

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Sejak awal tahun 2000-an, berbagai aksi teror telah mengguncang negara ini, termasuk Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, hingga serangan di Thamrin pada 2016 (Argamaya, 2020). Pelaku utama dari serangan-serangan tersebut umumnya berasal dari kelompok ekstremis yang berideologi radikal, baik yang berskala nasional maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan internasional. Munculnya organisasi-organisasi teroris seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansorut Tauhid (JAT), dan kemudian Jamaah Ansorut Daulah (JAD), menunjukkan bagaimana paham radikal terus berkembang, bahkan mengalami regenerasi seiring dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi di tingkat global maupun nasional (Asrori, 2019).

Kemunculan kelompok-kelompok ekstremis ini tidak terlepas dari dinamika pergerakan jihad global, terutama setelah deklarasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada tahun 2014. ISIS menarik banyak simpatisan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menjadi salah satu pemasok terbesar bagi jaringan tersebut. Sedangkan dikawasan Asia terdapat Organisasi Jemaah Islamiyah (JI) yang didirikan pada awal 1990-an dengan tujuan mendirikan negara Islam di Asia Tenggara, mencakup wilayah seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina selatan. Organisasi ini bertanggung jawab atas serangkaian serangan teroris di Indonesia, termasuk

Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, di antaranya 88 warga Australia.(Center, n.d.) Serangan ini menandai salah satu aksi teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Beberapa organisasi radikal di Indonesia seperti JAT akhirnya berafiliasi dengan ISIS dan berkembang menjadi JAD yang lebih agresif dalam melakukan aksi terorisme di dalam negeri. Para anggotanya melakukan serangkaian serangan bom bunuh diri dan tindakan radikal lainnya yang tidak hanya menargetkan aparat keamanan, tetapi juga masyarakat sipil (Widya, 2020b).

Sejak peristiwa Bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, Indonesia terus menghadapi berbagai aksi teror yang mengancam keselamatan masyarakat dan kedaulatan negara. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010. BNPT bertugas merumuskan kebijakan, strategi, dan program di bidang penanggulangan terorisme, serta mengoordinasikan instansi terkait dalam pelaksanaannya. Salah satu pendekatan utama BNPT dalam menangani terorisme adalah melalui program deradikalisasi yang bertujuan mengubah pola pikir radikal para narapidana terorisme dan simpatisannya menjadi lebih moderat, sehingga mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Hingga akhir 2018, BNPT melaporkan bahwa program deradikalisasi telah diikuti oleh 800 orang, termasuk 325 mantan narapidana terorisme, dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%. (Sugiarto, 2020)

Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 terus melakukan berbagai langkah strategis

untuk mencegah penyebaran paham radikal dan menangani para pelaku terorisme. BNPT, yang berperan sebagai lembaga koordinatif dalam penanggulangan terorisme, menjalankan strategi deradikalisasi bagi para mantan narapidana terorisme serta individu-individu yang berpotensi terpapar ideologi ekstrem. Sementara itu, Densus 88 lebih berfokus pada tindakan preventif dan represif, termasuk penangkapan anggota kelompok teroris serta pembubaran jaringan mereka sebelum melakukan aksi kekerasan.

Seiring berkembangnya metode penanganan terorisme, strategi komunikasi dalam program deradikalisasi menjadi salah satu aspek penting dalam menanggulangi penyebaran radikalisme. BNPT menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan pentahelix, yang melibatkan lima elemen utama: pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor bisnis. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak dalam upaya mencegah dan menangani radikalisme, baik dalam skala nasional maupun komunitas lokal. Salah satu tantangan utama dalam strategi ini adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan deradikalisasi secara efektif kepada individu yang telah lama berada dalam jaringan ekstremis.

Dalam konteks inilah, muncul berbagai inisiatif berbasis komunitas yang didukung oleh BNPT sebagai mitra dalam menjalankan program deradikalisasi. Salah satu contoh nyata dari inisiatif ini adalah Rumah Moderasi Mojokerto, sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 2022 dengan tujuan utama untuk membantu mantan ekstremis kembali ke masyarakat serta menyebarkan nilai-nilai moderasi (BNPT, 2022). Berbeda dengan pendekatan yang bersifat koersif, Rumah Moderasi Mojokerto lebih menekankan pada

rekonsiliasi sosial dan pemulihan psikologis bagi para mantan narapidana terorisme serta keluarga mereka. Pendekatan ini penting mengingat banyak mantan ekstremis mengalami kesulitan untuk diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani hukuman mereka.

Rumah Moderasi Mojokerto didirikan oleh Lutfi Teguh Oktavianto, seorang mantan anggota JAD yang pernah terlibat dalam aktivitas radikal, bersama dengan ayahnya, Sutrisno, yang juga pernah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Setelah menjalani hukuman dan menyadari dampak buruk dari keterlibatan mereka dalam organisasi ekstremis, mereka bertekad untuk mendirikan sebuah wadah yang bisa menjadi tempat rehabilitasi bagi individu-individu yang memiliki pengalaman serupa. Dalam menjalankan misinya, Rumah Mudah Mojokerto berkolaborasi dengan tokoh masyarakat seperti Ali Imron, seorang aktivis Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh masyarakat sekitar Kecamatan Kemlagi yang dulunya berprofesi sebagai guru.

Rumah Moderasi Mojokerto resmi didirikan pada Februari 2022 dengan dukungan dari BNPT serta Pemerintah Daerah Mojokerto. Kehadiran Rumah Moderasi Mojokerto bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para mantan ekstremis, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Salah satu program utama yang dijalankan oleh Rumah Moderasi Mojokerto adalah pembinaan berbasis keluarga, di mana mantan ekstremis tidak hanya dibina secara individu, tetapi juga melibatkan pasangan dan anak-anak mereka. Pendekatan ini dilakukan karena dalam banyak kasus, keterlibatan seseorang dalam jaringan radikal sering kali berdampak pada seluruh anggota

keluarganya.

Selain itu, Rumah Moderasi Mojokerto juga aktif dalam menyebarkan kontra-narasi terhadap propaganda radikal yang masih beredar di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Moderasi Mojokerto bekerja sama dengan BNPT dalam mengembangkan strategi komunikasi yang bertujuan untuk menangkal narasi-narasi radikal dan menggantinya dengan suguhan pesan-pesan yang lebih moderat.

Namun, meskipun telah menunjukkan perkembangan yang positif, upaya deradikalisasi melalui mitra BNPT seperti Rumah Moderasi Mojokerto masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial terhadap mantan ekstremis, di mana banyak masyarakat masih sulit menerima mereka kembali. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dukungan finansial juga menjadi hambatan dalam pengembangan program-program rehabilitasi yang lebih luas. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar upaya deradikalisasi dapat berjalan secara lebih efektif.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi BNPT dalam upaya deradikalisasi melalui mitranya, dengan studi kasus Rumah Moderasi Mojokerto. Penelitian ini akan mengkaji Langkah-langkah strategis yang digunakan oleh BNPT dalam bekerja sama dengan Rumah Moderasi Mojokerto serta bagaimana strategi tersebut berkontribusi dalam membentuk pemahaman yang lebih moderat di kalangan individu yang sebelumnya terpapar paham radikal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam program deradikalisasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi dalam upaya menangani radikalisme di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi komunikasi Rumah Moderasi Mojokerto sebagai mitra BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi komunikasi Rumah Moderasi Mojokerto dalam program deradikalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis strategi komunikasi Rumah Moderasi Mojokerto sebagai mitra BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi.
- 2) Mengidentifikasi faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi komunikasi Rumah Moderasi Mojokerto dalam program deradikalisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharap mampu menambah wawasan dalam kajian komunikasi dan deradikalisasi, khususnya di lingkungan Universitas Islam Majapahit.
 - b. Penelitian ini diharap mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu komunikasi khususnya komunikasi persuasif dan dapat memunculkan ide-ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan rekomendasi bagi BNPT dan mitranya dalam mengoptimalkan strategi komunikasi dalam program deradikalisasi.
 - b. Diharap penelitian ini juga memberikan sumbangsih wawasan guna memperluas sudut pandang pembaca.